



OPTIMALISASI PENGELOLAAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Abdurrahman K. Jusuf¹⁾, Sastro Mustapa Wantu²⁾, Yakob Noho Nani³⁾

Program Studi Magister Administrasi Publik

Universitas Negeri Gorontalo 2024

E-mail: ajvj1709@gmail.com

Abstract (English)

The focus of this research is 1) Optimizing the management of construction work contracts in the process of procurement of goods and services is examined from the stages of planning, organizing, monitoring and evaluating. 2) Determining Factors Optimizing the management of construction work contracts in the process of procuring goods and services in North Gorontalo Regency. The approach used in this study is qualitative. The research method is descriptive qualitative. Data collection is carried out by observation, interviews, documentation and trigulation. The data analysis technique in this study uses the Miles and Huberman approach, which is carried out with data reduction, data presentation and drawing/ verification drawing. The results of the study that 1) In the process of managing construction work contracts in the process of procurement of goods and services, it is almost entirely running optimally, in accordance with applicable regulations. But for some construction workers experience problems and result in termination of contracts. 2) Determining Factors Optimizing the management of construction work contracts in the process of procurement of goods and services in North Gorontalo Regency, the number and quality of human resources, work management, material availability and infrastructure, funding. Lack of HR capabilities in contract management, work management that is not in accordance with SOPs, lack of infrastructure and material availability, as well as lack of availability of funds used in construction work greatly affects the management of construction work contracts.

Sejarah Artikel

Submitted: 5 Oktober 2024

Accepted: 11 Oktober 2024

Published: 12 Oktober 2024

Abstrak (Indonesia)

Fokus penelitian ini yaitu 1) Optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di kaji dari tahapan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi. 2) Faktor penentu optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di kabupaten Gorontalo Utara. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data di lakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan trigulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman yakni dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian bahwa 1) pada proses pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa hampir secara keeluruhan sudah berjalan dengan optimal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun untuk beberapa pekerjaan konstruksi mengalami masalah dan

Sejarah Artikel

Submitted: 5 Oktober 2024

Accepted: 11 Oktober 2024

Published: 12 Oktober 2024

Kata Kunci

Pelayanan;
Kemahasiswaan;
Fakultas_Teknik;
Kualitas





berakibat adanya pemutusan kontrak. 2) factor penentu Optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara ditentukan, Jumlah dan mutu SDM, Manajemen kerja, Ketersediaan material dan infrastruktur, Pendaanaan. Kurangnya kemampuan SDM dalam pegelolaan kontrak, Manajemen kerja yang belum sesuai dengan SOP, Kurangnya ketersediaan infrastruktur dan material, serta kurangnya ketersediaan dana yang di gunakan dalam pekerjaan konstruksi sangat berpengaruh pada pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses tindakan pemerintah untuk mengatur dan mengelola sistem yang berlaku, kemudian kebijakan publik diartikan dengan suatu hukum yang mengatur dan mengikat masyarakat dalam berjalannya suatu sistem. Abdullah, dkk (2013: 29) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah sebagai suatu sistem pembuatan, pelaksanaan, dan pengendalian keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan/penyediaan sumber daya (barang atau jasa) pada suatu proyek tertentu. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa (Suprianto et al., 2019).

Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah mengamanatkan bahwa semua proses pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga nanti dapat diperoleh penyedia barang/jasa yang mempunyai kualifikasi dan diharapkan mampu menyediakan barang/jasa sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan (Rahayu & Murtinah, 2022). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Prosedur pengelolaan barang dan jasa pemerintah terdiri atas; persiapan pemilihan penyedia, perencanaan pemilihan penyedia, melakukan pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak pengadaan (Lestyowati, 2018). Pelaksanaan kontrak pengadaan merupakan salah satu tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa, adapun tahapan dalam proses tersebut secara garis besar terdiri dari (1) perumusan kontrak pengadaan barang dan jasa, (2) pengendalian kotrak pengadaan barang dan jasa, dan (3) melakukan serah terima hasil pengadaan barang dan jasa.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing - masing pihak yang membuat kontrak (Yudhistira & Wiryawan, 2023). Kontrak untuk pekerjaan publik antara pemerintah dengan sektor swasta/privat merupakan bisnis dengan ukuran yang sangat besar. Mulai dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan, bangunan dan peralatan kantor, hingga pembelian barang dan jasa untuk kantor pemerintah (Disemadi & Roisah, 2019). Bahkan sektor publik merupakan salah satu pembelian barang dan jasa yang terbesar dalam perekonomian suatu Negara. Dengan mengikuti pedoman dan prinsip yang diatur dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, diharapkan



pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga proyek-proyek konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan.

Kontrak pengadaan merupakan suatu kesatuan dari siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila kontrak terlaksana dengan baik, maka hal ini pun pasti berpengaruh terhadap kualitas pengadaan barang dan jasa (Yudhistira & Wiryawan, 2023). Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mana merupakan landasan yuridis dari aktivitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu tak bisa dipungkiri di setiap lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah pasti melakukan aktivitas pengadaan barang dan jasa. Pemerintah tidak selalu mampu untuk melakukan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkannya, oleh karenanya dia membutuhkan pihak ketiga atau penyedia.

Pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo Utara sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melakukan segenap aktivitas pemerintahannya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik tentu melaksanakan aktivitas pengadaan barang dan jasa. Fenomena secara umum pada proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo sebagaimana data di lapangan, bahwa hamper secara keeluruhan sudah berjalan dengan optimal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi terdapat beberapa paket pekerjaan yang melibatkan penyedia berakhir dengan pemutusan kontrak oleh pemerintah. Salah satu factor yang menyebabkan terjadi resiko tersebut adalah kurang optimalnya pengelolaan kontrak pengadaan barang jasa yang di lakukan oleh OPD teknis selaku pelaksana paket pekerjaan konstruksi.

Terkait dengan evaluasi kebijakan publik pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara khususnya pada OPD teknis pelaksana pekerjaan konstruksi yang melaksanakan prose pengadaan barang dan jasa. Meskipun telah dilakukan dengan baik namun masih saja terdapat berbagai permasalahan di lapangan sebagaimana hasil observasi peneliti yakni pelaksanaan proses pengelolaan kontrak oleh OPD teknis di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih belum optimal. Dari hasil wawancara awal pada masing-masing OPD teknis masalah yang sering timbul pada proses pengelolaan kontrak yakni pada tahapan pengendalian pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa. Dimana pada tahapan ini Penyedia dan PA/KPA/ PPK dapat harus memastikan bahwa sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa akan tercapai. Sasaran atau target yang ditetapkan di dalam kontrak pengadaan barang/jasa meliputi pemenuhan terhadap syarat kualitas, persyaratan waktu, dan persyaratan biaya.

Permasalahan mengenai pengelolaan kontrak sangatlah penting agar seluruh program pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara bisa berjalan dengan baik dan memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat, dimana hasil wawancara yang dilakukan pada tokoh masyarakat ditemukan bahwa masalah lain yang sering muncul terkait dengan pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi adalah terkait dengan pengawasan pelaksanaan proyek. Pengawasan yang kurang ketat atau tidak efektif dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, seperti keterlambatan dalam penyelesaian proyek, penggunaan



bahan material yang tidak sesuai standar, atau pelanggaran terhadap peraturan keselamatan kerja. Masalah yang tidak kalah penting adalah terkait dengan manajemen biaya proyek. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proyek konstruksi digunakan secara efisien dan efektif.

Masalah terkait dengan penyelesaian sengketa juga dapat timbul dalam pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi. Sengketa antara pemerintah dan kontraktor, atau antara kontraktor dengan pihak lainnya, bisa muncul karena perbedaan interpretasi terhadap ketentuan kontrak, perselisihan terkait pembayaran, atau pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual lainnya. Selain masalah-masalah tersebut, aspek-aspek lain seperti perubahan lingkup pekerjaan, kurangnya koordinasi antarpihak terkait, dan kurangnya kapasitas dalam pengelolaan kontrak juga dapat menjadi kendala dalam pengadaan dan pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif, sehingga proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Gorontalo Utara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai Optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti dalam menyusun Skripsi ini, adalah dimulai dari proses penyusunan Proposal Penelitian sampai dengan ujian. Waktu yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini yaitu terhitung dari bulan Februari 2024 hingga Juni 2024. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan trigulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan Miles dan Huberman yakni dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN

1. Paparan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

a. Perencanaan

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa proses perencanaan dan pengelolaan kontrak konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara mencakup langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur yang memastikan proyek konstruksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam menetapkan lingkup pekerjaan konstruksi, identifikasi kebutuhan proyek dilakukan berdasarkan rencana pembangunan daerah. Hal ini mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan infrastruktur dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lingkup pekerjaan sesuai dengan prioritas pembangunan dan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, dokumen lelang disusun melalui kolaborasi antara tim teknis dan ahli hukum. Spesifikasi teknis dan gambar



kerja dikembangkan oleh tim insinyur berdasarkan standar nasional dan kebutuhan proyek, sementara syarat-syarat kontrak dirancang untuk memastikan kejelasan tanggung jawab dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Pentingnya koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk PPK, tim teknis, ahli hukum, dan konsultan, dalam memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengelolaan kontrak konstruksi dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, manajemen kerja, ketersediaan material dan infrastruktur, serta pendanaan yang memadai dan terencana dengan baik akan sangat menentukan keberhasilan dan efisiensi dalam pengelolaan proyek konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara.

b. Pengorganisasian

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa proses pengorganisasian dalam pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan evaluasi dan penilaian penawaran di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan sangat sistematis, transparan, dan akuntabel. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sistem pengadaan barang dan jasa konstruksi yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Prosesnya dimulai dari pembentukan tim evaluasi yang terdiri dari berbagai ahli, pengumuman pelelangan yang dilakukan secara luas dan transparan, hingga penerimaan dan evaluasi penawaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan aplikasi untuk pengiriman dan penerimaan penawaran memastikan keamanan dan kerahasiaan data. Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas, dengan fokus pada aspek teknis, administrasi, dan kualifikasi penyedia jasa. Selain itu, peraturan terbaru yang menghapus evaluasi finansial menunjukkan penyesuaian terhadap regulasi yang dinamis, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

c. Pelaksanaan

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa pelaksanaan pengelolaan kontrak di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan sangat sistematis, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses penandatanganan kontrak dilakukan sesuai dengan tahapan dan kaidah yang telah diatur dalam UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, Perpres 12 tahun 2021, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2023, dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Pengawasan kontrak dilakukan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, dibantu oleh konsultan pengawas, pengawas dinas, PPTK, dan Tim Teknis yang ditunjuk. Terkadang, tim ahli dan tim hukum dilibatkan dalam hal perubahan kontrak (addendum) apabila diperlukan masukan dan arahan sesuai kapasitas dan kapabilitasnya.

Secara kolektif, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sistem pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Proses penandatanganan kontrak dilakukan dengan transparan dan sesuai regulasi, pengawasan dilakukan secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis dan standar kualitas, dan pembayaran dilakukan berdasarkan progres yang diverifikasi oleh tim pengawas. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar kualitas dijamin melalui



pengawasan ketat dan pendampingan hukum, serta pengendalian kontrak kritis dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya dan kemampuan manajerial yang ada.

d. Monitoring dan Evaluasi

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa monitoring dan evaluasi dalam optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan adanya pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Secara keseluruhan, proses ini melibatkan berbagai tahapan pemantauan, evaluasi kualitas, identifikasi masalah, penyusunan laporan, penilaian kinerja, dan evaluasi penggunaan anggaran. Pemantauan kemajuan pekerjaan dilakukan melalui inspeksi lapangan rutin, laporan mingguan dari penyedia jasa, dan rapat koordinasi. Tim pengawas menggunakan alat pemantauan proyek seperti diagram Gantt untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap deviasi dari jadwal segera ditangani untuk menghindari penundaan. Evaluasi kualitas pekerjaan dilakukan melalui inspeksi lapangan dan pengujian material sesuai dengan spesifikasi teknis. Tim pengawas dan konsultan pengawas bertanggung jawab memastikan bahwa semua pekerjaan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Laporan kualitas disusun secara berkala dan setiap temuan disertai dengan rekomendasi tindakan korektif.

2. Faktor penentu optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

a. Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM)

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara dengan melibatkan evaluasi yang ketat terhadap kualifikasi dan pengalaman SDM, serta penerapan standar dan prosedur yang jelas untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap kontrak. Sehingga pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara sangat bergantung pada jumlah dan mutu SDM yang terlibat. Proses evaluasi yang ketat, pemantauan yang sistematis, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi lapangan menjadi kunci utama dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan standar kualitas dan jadwal yang telah ditetapkan. Keberhasilan optimalisasi pengelolaan kontrak ini juga ditentukan oleh kemampuan semua pihak terkait untuk bekerja sama secara efektif dan mematuhi prosedur serta regulasi yang berlaku.

b. Manajemen kerja

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa terdapat sejumlah aspek kunci yang menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi pelaksanaan proyek konstruksi. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, penyedia jasa konstruksi menyerahkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) kepada PPK, yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak. Jika terjadi pergeseran atau perubahan metode kerja, konsultan pengawas wajib



menegur secara berkala secara persuasif atau tertulis melalui media yang disepakati bersama. Pengendalian penyedia, konsultan pengawas, dan mutu pekerjaan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam rantai pasok pengadaan barang/jasa. PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas harus senantiasa berkoordinasi dalam menyikapi perbedaan karakteristik material di setiap lokasi pekerjaan untuk memaksimalkan penggunaan material yang sesuai dengan spesifikasi kontrak.

c. Ketersediaan material dan infrastruktur

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa sebelum menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan survei ketersediaan material atau merujuk pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya terkait ketersediaan material di wilayah tersebut. Dalam konteks pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi, ketersediaan material dan infrastruktur bukan hanya menjadi aspek teknis semata, tetapi juga krusial dalam memengaruhi kepatuhan terhadap waktu, biaya, dan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan mengikuti prosedur pengadaan yang transparan dan adil, dapat meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran etika dalam pelaksanaan proyek. Kolaborasi yang baik antara PPK, penyedia jasa konstruksi, konsultan perancang, dan inspektorat daerah menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan bersama untuk hasil yang optimal dalam setiap proyek konstruksi. Sehingga pendekatan yang terstruktur dan terkoordinasi dalam mengelola ketersediaan material dan infrastruktur sangat penting untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan mengintegrasikan regulasi yang tepat, pengelolaan yang efisien, dan pendekatan berbasis lapangan, dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas dalam setiap tahap pelaksanaan proyek konstruksi.

d. Pendanaan

Hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dimaknai bahwa Regulasi seperti Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 juga memberikan panduan terkait persyaratan kemampuan keuangan penyedia, meskipun hal ini tidak lagi diberlakukan secara mutlak dan telah digantikan dengan penilaian langsung terhadap arus kas dan asuransi yang diajukan. Pemeriksaan arus kas ini menjadi parameter penting dalam menilai kemampuan keuangan penyedia, dengan fokus pada kemampuan mereka untuk memulai dan menjalankan proyek tanpa mengalami kendala keuangan yang signifikan. Dari segi administrasi, integrasi antara data yang diambil dari Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Renja (SIRUP) menjadi penting untuk membantu dalam menyesuaikan rencana anggaran biaya (RAB) dengan ketersediaan anggaran yang ada, serta mempersiapkan perubahan DIPA jika terjadi force majeure atau perubahan kebutuhan proyek yang tidak terduga.

3. Temuan Hasil Penelitian

Berikut ini adalah paket pekerjaan konstruksi yang mengalami putus kontrak di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:



Tabel 1: Pekerjaan Konstruksi Putus Kontrak

| No | Tahun | Nama Paket | Pagu Anggaran |
|----|-------|---|-------------------|
| 1 | 2020 | Pembangunan/relokasi Puskesmas Kwandang | Rp 4.980.000.000 |
| 2 | 2022 | Peningkatan/pemeliharaan jalan Ombulodata | Rp 5.003.000.000 |
| 3 | 2022 | Peningkatan jalan Bualemo – Timbuale (Pilohibata) | Rp 2.903.000.000 |
| 4 | 2022 | Peningkatan jalan By-Pass | Rp 32.920.000.000 |
| 5 | 2023 | Peningkatan jalan By-Pass (PL) | Rp 21.481.453.928 |

Sumber: Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, 2024

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran bahwa adanya pengelolaan kontrak yang belum maksimal, dimana selama 4 tahun terakhir ini terjadi pekerjaan konstruksi yang putus kontrak, seperti pada tahun 2020 ke tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup pesat yakni sebesar 719,80% artinya jumlah pagu anggaran yang mengalami putus kontrak tahun 2022 sebanyak 7 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan optimalisasi pada manajemen kontrak dengan berbagai inovasi karena penyelenggaraan jasa konstruksi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 yang kemudian mengalami perubahan ketiga dengan nomor 54 tahun yang masih belum maksimal.

Perencanaan yang tidak matang dan tidak komprehensif sering kali menjadi akar dari masalah dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Jika perencanaan tidak mempertimbangkan secara menyeluruh aspek-aspek seperti estimasi anggaran yang akurat, ketersediaan sumber daya, dan penilaian risiko, maka peluang terjadinya penundaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek akan meningkat. Konsekuensi dari putus kontrak dapat sangat merugikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain berdampak pada penundaan atau penghentian sementara pembangunan infrastruktur yang diperlukan, hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian finansial karena biaya yang sudah dikeluarkan mungkin tidak akan menghasilkan nilai atau manfaat yang diharapkan. Selain itu, reputasi pemerintah daerah dalam mengelola proyek konstruksi juga dapat terpengaruh negatif, mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran dan proyek publik secara efektif.

Kurangnya pengawasan dan pengendalian selama pelaksanaan proyek dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan dari rencana awal, baik dari segi biaya, waktu, maupun kualitas. Tanpa pengawasan yang memadai, kontraktor mungkin tidak merasa terkendali dan dapat menimbulkan ketidakpastian yang berujung pada putus kontrak. Ketidakjelasan dalam interpretasi atau implementasi regulasi terkait kontrak konstruksi juga dapat berkontribusi pada putus kontrak. Perubahan kebijakan atau ketidaksesuaian antara kontrak dengan regulasi yang berlaku dapat mempersulit pelaksanaan proyek dan mengarah pada penyelesaian kontrak sebelum waktunya. Kejadian tak terduga atau force majeure, seperti bencana alam atau perubahan kebijakan pemerintah, sering kali menjadi alasan sah untuk putus kontrak. Ketika kontraktor dan pemberi kerja tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani situasi ini, penyelesaian proyek dapat menjadi terhambat dan akhirnya mengarah pada putus kontrak.



Sementara itu *Novelty* dalam kajian ini yakni menghubungkan antara fokus pertama dengan fokus kedua yang dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

a. Urgensi Faktor Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM), Manajemen kerja, Ketersediaan material dan infrastruktur & Pendanaan terhadap perencanaan optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas sangat krusial dalam optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. SDM yang mencakup tenaga ahli teknis, pengawas lapangan, serta administrasi proyek memainkan peran vital dalam setiap tahapan proyek konstruksi, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Jumlah SDM yang mencukupi akan memastikan bahwa semua aspek pekerjaan konstruksi dapat terkelola dengan baik. Perencanaan yang matang memerlukan tim yang terdiri dari berbagai keahlian yang mampu melakukan analisis terperinci terhadap persyaratan teknis, anggaran, dan jadwal pelaksanaan. Dengan jumlah SDM yang memadai, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap proyek memiliki personil yang dapat mengelola tugas-tugas khusus, seperti perencanaan, pengawasan kualitas, dan pengendalian biaya, secara efektif.

Kualitas SDM juga penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tenaga ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam industri konstruksi dapat mengidentifikasi dan menangani potensi risiko proyek dengan lebih baik, serta memberikan solusi yang tepat waktu jika terjadi perubahan atau tantangan selama pelaksanaan proyek. Selain itu, keterampilan dalam manajemen kontrak, termasuk negosiasi dan penyelesaian perselisihan, juga diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek konstruksi. Investasi dalam jumlah dan mutu SDM yang memadai tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional proyek konstruksi, tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya penundaan atau kegagalan proyek. Dengan demikian, Kabupaten Gorontalo Utara perlu terus memprioritaskan pengembangan dan pengelolaan SDM yang berkualitas sebagai bagian integral dari strategi optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Manajemen kerja yang efektif merupakan landasan yang sangat penting dalam perencanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Manajemen kerja mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan strategis hingga implementasi operasional sehari-hari dalam setiap tahap proyek konstruksi. Perencanaan yang baik memerlukan pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya, waktu, dan biaya. Manajemen kerja yang efektif memastikan bahwa semua aspek ini terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan proyek secara efisien. Hal ini termasuk penentuan jadwal yang realistis, alokasi sumber daya yang optimal, dan pemantauan terhadap kemajuan proyek secara terus-menerus.

Selain itu, manajemen kerja yang baik juga mencakup koordinasi yang efektif antara semua pihak terkait, termasuk kontraktor, konsultan, dan pihak pengawas. Komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting untuk menghindari miskomunikasi yang dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Manajemen kerja yang efektif juga memperhatikan manajemen risiko dan pengendalian



kualitas. Identifikasi risiko potensial sejak awal dan penyusunan strategi mitigasi yang tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Sementara itu, pengendalian kualitas yang ketat memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan memenuhi standar yang ditetapkan dalam kontrak. Manajemen kerja yang baik tidak hanya memfasilitasi penyelesaian proyek konstruksi sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditetapkan, tetapi juga meningkatkan reputasi pemerintah daerah dalam pengelolaan proyek publik. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu memastikan bahwa manajemen kerja yang efektif menjadi prioritas dalam setiap inisiatif untuk optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai adalah faktor krusial dalam perencanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Pekerjaan konstruksi yang berhasil membutuhkan pasokan material yang tepat waktu dan berkualitas, serta infrastruktur pendukung yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proyek secara efisien. Ketersediaan material yang cukup adalah prasyarat penting untuk kelancaran proyek konstruksi. Hal ini termasuk bahan bangunan seperti beton, baja, dan material lainnya yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Tidak adanya material yang cukup atau kualitas yang kurang dapat menyebabkan penundaan dalam pekerjaan dan potensi perubahan biaya yang tidak terduga.

Infrastruktur yang memadai juga mendukung efisiensi pelaksanaan proyek konstruksi. Hal ini termasuk akses yang baik ke lokasi proyek, fasilitas penyimpanan material yang aman, serta sistem transportasi yang dapat mendukung distribusi material dan peralatan konstruksi dengan lancar. Infrastruktur yang baik membantu mengurangi waktu tunggu dan biaya logistik, yang pada gilirannya mempercepat penyelesaian proyek dan mengoptimalkan pengelolaan kontrak. Selain itu, perencanaan yang matang juga mencakup strategi untuk mengelola dan memonitor penggunaan material dan infrastruktur selama pelaksanaan proyek. Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan material, penjadwalan pengiriman yang efisien, dan pemeliharaan infrastruktur pendukung merupakan bagian integral dari manajemen proyek yang sukses. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara harus memastikan bahwa ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai menjadi prioritas dalam perencanaan setiap proyek konstruksi. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko penundaan, dan memastikan keberhasilan dalam pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi.

Pendanaan yang memadai adalah faktor krusial dalam perencanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai salah satu elemen utama dalam menopang pelaksanaan proyek konstruksi, pendanaan yang cukup dan terkelola dengan baik memastikan kelancaran operasional dan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pendanaan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan uang muka yang cukup kepada kontraktor. Uang muka ini penting untuk memfasilitasi memulainya pekerjaan konstruksi tanpa menghambat kelancaran proyek. Dengan memberikan uang muka yang sesuai, pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pelaksanaan proyek yang sukses dan



memberikan insentif kepada kontraktor untuk menjaga kualitas dan waktu pelaksanaan proyek.

Selain itu, pengelolaan yang efektif terhadap sumber daya keuangan proyek juga sangat penting. Hal ini mencakup pemantauan yang cermat terhadap pengeluaran proyek, penjadwalan pencairan dana yang tepat waktu, serta penyesuaian anggaran jika terjadi perubahan dalam biaya atau skop proyek. Pengelolaan pendanaan yang baik akan membantu menghindari kekurangan dana yang dapat menghambat progres proyek dan menyebabkan penundaan atau bahkan penghentian proyek. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana publik juga penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Mekanisme akuntabilitas yang kuat dan pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana proyek konstruksi akan meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dijelaskan dan disetujui sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pendanaan yang memadai dan pengelolaan keuangan yang efektif adalah prasyarat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi yang sukses di Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan memastikan bahwa pendanaan cukup tersedia dan dikelola dengan transparan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dapat diselesaikan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

b. Urgensi Faktor Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM), Manajemen kerja, Ketersediaan material dan infrastruktur & Pendanaan terhadap pengorganisasian optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam pengorganisasian optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Jumlah SDM yang mencukupi memastikan bahwa setiap aspek dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek dapat dikelola secara efektif. Dengan tim yang terdiri dari tenaga ahli teknis, pengawas lapangan, dan administrasi proyek yang kompeten, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap tahap konstruksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Sementara itu, mutu SDM menjadi penentu utama dalam menjaga kualitas pekerjaan konstruksi. SDM yang memiliki pengetahuan mendalam, keterampilan yang terlatih, dan pengalaman yang relevan mampu mengidentifikasi risiko potensial, merancang strategi mitigasi yang efektif, serta menangani tantangan teknis dengan baik. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan dan pengelolaan SDM yang berkualitas menjadi imperatif bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan setiap proyek konstruksi.

Manajemen kerja yang baik menjadi pondasi penting dalam pengorganisasian optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Manajemen yang efektif mencakup perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar berbagai pihak terkait, serta pengendalian yang ketat terhadap risiko dan kualitas. Dengan manajemen kerja yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya



seperti waktu, tenaga kerja, dan material digunakan secara efisien sesuai dengan rencana proyek. Komunikasi yang efektif antar semua stakeholder juga mendukung kelancaran pelaksanaan proyek dan meminimalkan risiko ketidaksesuaian atau konflik yang dapat menghambat progres. Selain itu, manajemen kerja yang baik juga mencakup strategi untuk mengatasi perubahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek, sehingga dapat menjaga proyek tetap dalam jadwal dan anggaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, fokus pada pengorganisasian manajemen kerja yang efektif menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai memiliki urgensi yang tinggi dalam pengorganisasian optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Material konstruksi yang tepat waktu dan berkualitas tinggi adalah prasyarat utama untuk menjaga kelancaran proyek. Ketersediaan material yang cukup dan sesuai spesifikasi memungkinkan pekerja konstruksi untuk bekerja tanpa hambatan, menghindari penundaan yang tidak diinginkan. Selain itu, infrastruktur yang mendukung seperti akses transportasi yang baik, fasilitas penyimpanan yang aman, dan sumber daya logistik yang efisien sangat penting untuk mendukung distribusi dan penggunaan material dengan tepat. Dengan memastikan ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan proyek konstruksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini juga akan berkontribusi pada pengendalian biaya dan waktu pelaksanaan proyek yang lebih baik, serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terkait dengan hasil kerja yang sesuai dengan standar dan harapan.

Pendanaan yang cukup dan terkelola dengan baik menjadi faktor krusial dalam pengorganisasian optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Keberhasilan proyek konstruksi sangat tergantung pada tersedianya dana yang memadai untuk membiayai seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian. Uang muka yang cukup bagi kontraktor memungkinkan mereka untuk memulai pekerjaan tanpa hambatan dan menyelesaikannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pengelolaan keuangan proyek yang efektif juga penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran proyek direncanakan dan dilakukan dengan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu, transparansi dalam penggunaan dana publik akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memprioritaskan pendanaan yang memadai dan pengelolaan keuangan yang efektif, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mencapai tujuan pembangunan infrastruktur dengan lebih baik.



c. Urgensi Faktor Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM), Manajemen kerja, Ketersediaan material dan infrastruktur & Pendanaan terhadap pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) memiliki urgensi yang besar terhadap pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. SDM yang mencukupi dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menjamin keberhasilan setiap tahap proyek konstruksi. Tenaga ahli yang kompeten dalam perencanaan, pengawasan, dan administrasi proyek dapat mengelola risiko dengan baik, memastikan penggunaan sumber daya secara efisien, serta menjamin kepatuhan terhadap jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu, mutu SDM dalam hal pengetahuan teknis, keterampilan, dan pengalaman juga krusial dalam menjaga kualitas hasil konstruksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan SDM yang berkualitas akan membawa dampak positif jangka panjang bagi Kabupaten Gorontalo Utara, tidak hanya dalam meningkatkan efisiensi proyek tetapi juga dalam membangun kapasitas lokal yang berkelanjutan dalam sektor konstruksi.

Manajemen kerja yang baik merupakan faktor penting dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Manajemen yang efektif meliputi perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar tim proyek, serta pengendalian yang ketat terhadap setiap aspek pelaksanaan proyek. Dengan manajemen yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, dan material digunakan secara efisien dan efektif. Komunikasi yang lancar antar semua pihak terlibat juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan menangani perubahan atau tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dengan demikian, fokus pada manajemen kerja yang efektif tidak hanya mendukung kelancaran operasional proyek tetapi juga meminimalkan risiko penundaan dan biaya tambahan yang tidak terduga, sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Material konstruksi yang tepat waktu, berkualitas, dan sesuai spesifikasi adalah prasyarat utama untuk menjamin kelancaran proyek. Infrastruktur pendukung seperti jalan akses, transportasi, dan fasilitas penyimpanan yang memadai juga diperlukan untuk mendukung distribusi dan penggunaan material secara efisien. Dengan memastikan ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan proyek konstruksi, mengurangi risiko penundaan akibat kekurangan bahan atau fasilitas, serta meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan terkait hasil kerja yang sesuai dengan standar yang diharapkan.

Pendanaan yang memadai dan terkelola dengan baik memiliki urgensi besar dalam pelaksanaan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Ketersediaan dana yang cukup dan tepat waktu memungkinkan kontraktor untuk memulai dan menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Uang muka yang memadai juga penting untuk memfasilitasi kebutuhan awal



proyek tanpa mengalami hambatan yang berarti. Pengelolaan keuangan proyek yang transparan dan akuntabel tidak hanya meminimalkan risiko kekurangan dana atau pengeluaran yang tidak terduga, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah. Dengan memprioritaskan pendanaan yang memadai dan pengelolaan keuangan yang efektif, Kabupaten Gorontalo Utara dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mencapai tujuan pembangunan infrastruktur dengan lebih baik.

d. Urgensi Faktor Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM), Manajemen kerja, Ketersediaan material dan infrastruktur & Pendanaan terhadap monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) memainkan peran krusial dalam monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. SDM yang berkualitas dalam tim monitoring dan evaluasi dapat menghasilkan analisis yang mendalam terhadap setiap tahap proyek konstruksi. Mereka mampu secara efektif mengawasi pelaksanaan kontrak, memantau pencapaian target waktu, biaya, dan kualitas, serta mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Keahlian dan pengalaman SDM dalam mengidentifikasi dan menangani masalah potensial atau penundaan proyek menjadi kunci untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan dapat menghindari risiko ketidaksesuaian dengan kontrak. Dengan demikian, investasi dalam pengembangan SDM yang kompeten dalam bidang monitoring dan evaluasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kontrak konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Manajemen kerja yang efektif memiliki urgensi besar dalam monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Manajemen yang baik memastikan bahwa semua tahap proyek dipantau dengan baik dan dievaluasi secara teratur. Dengan manajemen yang kuat, tim monitoring dapat mengoordinasikan kegiatan pemantauan secara efisien, mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang mungkin muncul, serta merumuskan solusi yang tepat waktu. Evaluasi yang cermat terhadap kinerja kontraktor, penggunaan sumber daya, dan tingkat kepatuhan terhadap standar kontrak menjadi lebih mudah dilakukan dengan manajemen kerja yang baik. Selain itu, transparansi dalam pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pemangku kepentingan dapat membangun kepercayaan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, manajemen kerja yang efektif bukan hanya mendukung kelancaran operasional proyek tetapi juga meningkatkan efektivitas dari proses monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan kontrak konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai memiliki urgensi yang besar dalam monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Material konstruksi yang tepat waktu dan berkualitas, serta infrastruktur pendukung seperti transportasi dan akses logistik yang baik, sangat penting



untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dalam konteks monitoring, ketersediaan material yang memadai memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap penggunaan bahan dan implementasi desain sesuai spesifikasi. Di sisi lain, infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran distribusi material dan logistik, sehingga meminimalkan risiko penundaan akibat kelangkaan atau keterlambatan pengiriman. Evaluasi terhadap efektivitas penggunaan material dan infrastruktur dalam pelaksanaan proyek membantu memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan dengan efisien dan menghasilkan hasil kerja yang optimal sesuai dengan tujuan proyek. Dengan demikian, pengelolaan monitoring dan evaluasi yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari ketersediaan material dan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pendanaan yang memadai dan terkelola dengan baik memiliki urgensi besar dalam monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara. Monitoring dan evaluasi proyek memerlukan alokasi anggaran yang cukup untuk membiayai kegiatan pemantauan, penilaian kinerja, serta pelaporan hasil kepada pemangku kepentingan. Pendanaan yang cukup memungkinkan pemerintah daerah untuk mempekerjakan SDM yang berkualitas, menggunakan teknologi monitoring yang mutakhir, serta mengimplementasikan sistem evaluasi yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pendanaan yang memadai juga mendukung pengadaan material dan infrastruktur pendukung untuk memfasilitasi kegiatan monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan mengalokasikan sumber daya keuangan secara bijak dalam monitoring dan evaluasi, Kabupaten Gorontalo Utara dapat memastikan bahwa setiap proyek konstruksi dipantau dengan baik, hasilnya dievaluasi secara objektif, dan keputusan perbaikan dapat diambil tepat waktu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kontrak konstruksi.

PEMBAHASAN

1. Tahapan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian integral dari proses penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari perencanaan hingga penyelesaian proyek konstruksi serta pengelolaan kontrak yang mendukung efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan kontrak diperlukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau perubahan yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja penyedia jasa konstruksi dan memastikan bahwa hasil akhir proyek sesuai dengan yang diharapkan. Setelah semua pekerjaan selesai dan telah diverifikasi kepatuhannya, dilakukan proses penyelesaian kontrak yang mencakup pembayaran akhir kepada penyedia jasa konstruksi serta penutupan administratif dan hukum terkait.

Hasil analisis ditemukan bahwa proses optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi beberapa tahapan krusial. Tahapan pertama adalah perencanaan yang komprehensif, termasuk pengidentifikasian kebutuhan, penyusunan dokumen kontrak yang jelas, dan penentuan kriteria evaluasi. Selanjutnya, tahap pengadaan



yang melibatkan proses lelang atau seleksi penyedia jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan. Setelah kontrak ditandatangani, tahapan pelaksanaan dimulai dengan pemantauan progres, manajemen perubahan jika diperlukan, dan penyelesaian sesuai jadwal dan spesifikasi. Terakhir, evaluasi pasca-proyek untuk mengevaluasi progres pekerjaan, hasil pekerjaan, dan perbaikan untuk proyek-proyek selanjutnya.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Hasibuan (2019: 39-49) & PP nomor 29 tahun 2000 bahwa dengan mengikuti tahapan-tahapan manajemen ini secara teliti dan efektif, pemerintah daerah atau lembaga yang terlibat dapat memastikan bahwa pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam meminimalkan risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mencapai efisiensi dan kualitas yang diinginkan dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

2. Faktor penentu optimalisasi pengelolaan kontrak Pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gorontalo Utara

Faktor penentu optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa merupakan kunci untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan keberhasilan proyek konstruksi. Dalam konteks ini, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan dielaborasi untuk memahami bagaimana pengelolaan kontrak dapat dioptimalkan secara efektif. Pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi dalam proses pengadaan barang dan jasa melibatkan serangkaian langkah yang rumit dan terkoordinasi dengan baik. Dengan memperhatikan faktor-faktor penentu yang telah disebutkan di atas, pengada dapat memastikan bahwa kontrak dijalankan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan proyek. Optimalisasi pengelolaan kontrak tidak hanya mempengaruhi hasil proyek secara keseluruhan tetapi juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan pada suatu wilayah.

Hasil analisis ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor krusial yang menentukan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain adalah manajemen yang efektif, termasuk perencanaan yang matang dan pemantauan yang terus-menerus. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam monitoring dan evaluasi, pendanaan yang memadai, serta infrastruktur dan material yang tersedia secara tepat waktu juga sangat berpengaruh. Faktor lain seperti regulasi yang jelas dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kontrak konstruksi dapat dikelola dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan pernyataan dari Kiranasari et al., (2020) bahwa faktor-faktor jumlah dan mutu SDM, manajemen kerja, ketersediaan material dan infrastruktur, serta pendanaan yang semuanya saling terkait dan saling mendukung dalam optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi. Dengan memperhatikan semua aspek ini secara komprehensif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pembangunan infrastruktur daerah.



SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. Proses optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara meliputi beberapa tahapan krusial yakni perencanaan yang komprehensif, termasuk pengidentifikasian kebutuhan, penyusunan dokumen kontrak yang jelas, dan penentuan kriteria evaluasi. Selanjutnya, tahap pengadaan yang melibatkan proses lelang atau seleksi penyedia jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan. Setelah kontrak ditandatangani, tahapan pelaksanaan dimulai dengan pemantauan progres, manajemen perubahan jika diperlukan, dan penyelesaian sesuai jadwal dan spesifikasi. Terakhir, evaluasi pasca-proyek untuk mengevaluasi progres pekerjaan, hasil pekerjaan, dan perbaikan untuk proyek-proyek selanjutnya.
2. Terdapat beberapa faktor krusial yang menentukan optimalisasi pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi di Kabupaten Gorontalo Utara antara lain adalah manajemen yang efektif, termasuk perencanaan yang matang dan pemantauan yang terus-menerus. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam monitoring dan evaluasi, pendanaan yang memadai, serta infrastruktur dan material yang tersedia secara tepat waktu juga sangat berpengaruh. Faktor lain seperti regulasi yang jelas dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kontrak konstruksi dapat dikelola dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peran sentral dalam pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi. Untuk optimalisasi, disarankan melakukan peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen kontrak, termasuk pelatihan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi untuk memantau dan melaporkan kemajuan proyek secara real-time. Memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak, termasuk audit internal yang reguler dan penerapan teknologi untuk pemantauan lapangan. Serta mendorong kerjasama yang lebih erat dengan pihak eksternal seperti konsultan perencanaan dan kontraktor untuk memastikan pemahaman yang jelas terhadap spesifikasi teknis dan tujuan proyek.
2. Pimpinan Daerah (Eksekutif dan Legislatif) Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi pengelolaan kontrak, termasuk menyusun kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan kontrak yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dengan memastikan konsistensi antara rencana dan realisasi proyek, serta mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum secara berkala. Serta membuka saluran komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat untuk memastikan transparansi informasi terkait proyek konstruksi yang sedang berlangsung.



3. Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan internal dan mendeteksi potensi penyimpangan. Rekomendasi untuk Inspektorat yakni memperkuat kapasitas pengawasan internal terhadap proses pengadaan barang dan jasa, dengan fokus pada pengelolaan kontrak pekerjaan konstruksi. Melakukan audit rutin dan mendalam terhadap proyek-proyek konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku. Serta menyediakan laporan audit yang komprehensif kepada pimpinan daerah dan publik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
4. Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara memiliki peran sebagai pengawas sosial dan partisipan aktif dalam proses pengelolaan kontrak. Rekomendasi untuk masyarakat yakni menggalakkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek konstruksi melalui mekanisme seperti forum masyarakat, kelompok pemantau proyek, dan laporan langsung atas temuan di lapangan. Mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam pengelolaan kontrak serta dampak positif dari pengelolaan konstruksi yang baik bagi pembangunan daerah. Serta membangun kolaborasi yang konstruktif dengan pemerintah setempat untuk memastikan kepentingan masyarakat terwakili dan direspons dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93-104. ISSN 1979-5645
- Aljufri Bokingo, M., & Yusnita, N. (2017). Pengaruh sumber daya manusia, penatausahaan, Pengawasan barang milik daerah terhadap Pengamanan barang milik daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Buol).
- Auliah Asman, H. A., & MT, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengelolaan aset tetap pada pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bouhawia, M. S., Irianto, G., & Baridwan, Z. (2015). The Effect of Working Experience, Integrity, Competence, and Organizational Commitment on Audit Quality (Survey State Owned Companies In Libya). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 6(4), 60-67. e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925
- Darmawan, D. (2008). *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Djarmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yustiono, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi di STIA LAN Bandung.
- Tulungen, E. E. W. (2014). Analisis Faktor- Faktor Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS (Edisi 7)*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, H., Haming, M., Zakaria, J., & Djamareng, A. (2017). Effect of Organizational Commitment, Competence and Good Governance on Employees Performance and Quality Asset Management.
- Gunawan, H. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasional, Kompetensi dan Good Governance Terhadap Kualitas Pengelolaan Aset Daerah di Pemerintah Kota Makassar.



- Hermawan, A. (2005). *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Azhar, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah dan Regulasi terhadap Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Banda Aceh*.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2011). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Arifai, M., Mustaqim, T., & Hasan, D. (2015). *Organizational Capacity and Financial Management Performance of Local Government*.
- Munadi, M., & Barnawi. (2011). *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djuwita, R., Soemantri, R., & Prima, G. K. (2018).
- Riduwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis (Cetakan Pertama)*. Bandung: Alfabeta.
- Rachmawati, R., Arwati, D., Herawati, S. D., & Arnan, S. G. (2016). *Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah*.
- Sabarno, H. (2008). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simamora, R., & Halim, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Tapanuli Selatan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(02), 29-43.
- Amerieska, S., Setiati, F., & Mulyono, I. (2018). *Analisis Faktor Tentang Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang)*.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. Jakarta: PPM.
- Tarigan, A. (2000). *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- The Influence of Organizational Commitment, Implementation of Accounting Information System and Workplace Environment to The Performance of Work Unit.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2014). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yusuf, M. (2013). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, N. F., Sintaningrum, & Utami, S. B. (2018). *Kapasitas Organisasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah di Indonesia*. *Jurnal Responsive*, 1(1), 1-5.
- Zelvia, D. (2015). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan PT. Telkom Medan*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Sumatera Utara.